

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Indonesia saat ini menghadapi tantangan nyata di bidang pertahanan dan keamanan. Lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik semakin kompleks, ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, sengketa wilayah, serta modernisasi militer di berbagai negara. Pada saat yang sama, Indonesia harus menjaga kedaulatan wilayah udara dan laut yang sangat luas dengan sumber daya pertahanan yang terbatas. Di tingkat internal, Indonesia juga dihadapkan pada persoalan keberlanjutan alutsista, khususnya di TNI Angkatan Udara. Sejumlah platform udara yang telah beroperasi dalam waktu lama menghadapi keterbatasan usia pakai, kesiapan operasional, dan dukungan logistik. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan modernisasi alutsista melalui pengadaan jet tempur generasi baru seperti Dassault Rafale dari Prancis.

Kerjasama pertahanan Indonesia–Prancis telah berkembang dari hubungan bilateral biasa menjadi kolaborasi strategis yang signifikan. Melalui mekanisme formal seperti DCA dan rutinitas dialog pertahanan, kedua negara memetakan kerangka kerja sama yang tidak hanya mencakup pembelian alutsista tetapi juga latihan militer, pendidikan personel, dan kemungkinan kolaborasi teknologi. Kepentingan strategis kedua pihak, seperti modernisasi militer dan perluasan ruang diplomasi bagi Indonesia; serta peningkatan kehadiran geopolitik dan peluang teknologi bagi Prancis menjadi pendorong utama hubungan ini. Kerja sama ini diperkirakan akan terus berkembang dengan memperhatikan tantangan regional dan kebutuhan strategis kedua negara.

Jet tempur Dassault Rafale sendiri adalah salah satu pesawat tempur multirole paling maju di dunia saat ini, dengan desain aerodinamis yang unggul, sistem avionik canggih, sensor mutakhir, dan fleksibilitas persenjataan yang tinggi. Konsep omnirole memungkinkan Rafale menjalankan berbagai misi dalam satu platform, dari superioritas udara hingga serangan darat presisi dan pengintaian. Rafale telah terbukti secara operasional dalam berbagai konflik global dan menjadi

pilihan banyak negara sebagai tulang punggung kekuatan udara mereka. Bagi Indonesia, akuisisi Rafale bukan sekadar pembelian pesawat, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam modernisasi alutsista udara dan integrasi kapabilitas udara ke dalam strategi diplomasi pertahanan yang lebih luas.

Pada dasarnya, akuisisi alutsista tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kegiatan teknis militer, tetapi juga sebagai bagian penting dari diplomasi pertahanan suatu negara. Diplomasi pertahanan sendiri merujuk pada penggunaan kerja sama militer secara damai untuk memperluas jaringan strategis, memperkuat hubungan negara, serta menciptakan kepercayaan politik antara angkatan bersenjata dan pemerintahan masing-masing negara. Dalam konteks hubungan Prancis dan Indonesia, akuisisi jet tempur Dassault Rafale bukan hanya soal modernisasi angkatan udara, tetapi juga alat strategis dalam memperkuat hubungan bilateral yang lebih luas.

Memahami mengapa Indonesia memilih Prancis sebagai mitra utama dalam pengadaan jet tempur *Dassault Rafale* tidak bisa hanya dilihat dari perspektif teknis militer atau preferensi kebijakan sementara. Berdasarkan Analisis rasional strategis, menunjukkan bahwa pemilihan Prancis sebagai mitra diplomasi pertahanan oleh Indonesia didasarkan pada evaluasi yang matang terhadap kepentingan nasional, risikonya, serta fleksibilitas politik yang dibutuhkan untuk mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri. Alternatif lain, meskipun membawa manfaat masing-masing, memiliki risiko politik atau keterbatasan fleksibilitas yang lebih besar. Prancis, dengan hubungan bilateral yang stabil dan komitmen terhadap kerja sama jangka panjang, dipandang sebagai pilihan strategis yang paling sesuai untuk tujuan diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks dinamika regional dan global saat ini.

Akuisisi Rafale oleh Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan kerja sama pertahanan yang lebih luas antara Indonesia dan Prancis. Jika ditarik kesimpulan, akuisisi Rafale oleh Indonesia bukan sekadar pembelian alutsista biasa, tetapi merupakan bagian dari kerangka kerja sama pertahanan bilateral yang berkelanjutan dan terintegrasi antara Indonesia dan Prancis. Proses ini melibatkan negosiasi intensif, dialog strategis, perencanaan kebijakan pertahanan nasional, serta sejumlah program pendukung yang memperkuat kerja

sama militer kedua negara. Akuisisi ini juga berfungsi sebagai instrumen politik dan strategi pertahanan yang memperdalam hubungan bilateral di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam diplomasi pertahanan kontemporer, kerja sama industri pertahanan, *transfer of technology* (ToT), dan program offset tidak lagi dipahami semata sebagai kompensasi ekonomi atau kewajiban kontraktual dari negara pemasok kepada negara pembeli. Sebaliknya, ketiga instrumen tersebut semakin dipandang sebagai *confidence-building measure* (CBM), yakni mekanisme untuk memperdalam keterikatan jangka panjang, membangun kepercayaan strategis, serta mengurangi ketidakpastian dalam hubungan pertahanan bilateral. Kerja sama industri, *offset*, dan ToT dalam akuisisi Rafale menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia–Prancis bergerak melampaui hubungan transaksional. Melalui pelibatan industri nasional, transfer pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan akses terbatas terhadap teknologi sensitif, kedua negara membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan jangka panjang. Dalam konteks ini, *offset* dan ToT Rafale berfungsi sebagai *confidence-building measure* yang memperkuat stabilitas hubungan bilateral, sekaligus mendukung tujuan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional tanpa mengorbankan otonomi strategisnya.

Salah satu indikator paling konkret dari keberhasilan diplomasi pertahanan adalah meningkatnya interoperabilitas militer antarnegara mitra. Berbeda dengan kesepakatan normatif ataupun pernyataan politik, interoperabilitas tercermin langsung dalam kemampuan angkatan bersenjata untuk beroperasi bersama secara aman, efektif, dan terkoordinasi. Akuisisi Rafale menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak berhenti pada tahap negosiasi dan penandatanganan kontrak, tetapi menghasilkan output konkret berupa peningkatan interoperabilitas militer. Melalui kesamaan platform, latihan bersama, dan kesesuaian prosedur operasional, Indonesia memperluas kapasitas kerja sama pertahanannya tanpa mengorbankan prinsip otonomi strategis. Dengan demikian, interoperabilitas yang dihasilkan dari akuisisi Rafale dapat dipahami sebagai hasil nyata diplomasi pertahanan Indonesia–Prancis, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor

pertahanan yang fleksibel, kredibel, dan rasional dalam dinamika keamanan regional dan global.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan baik pada tataran kebijakan, praktik diplomasi pertahanan, maupun pengembangan kajian akademik di masa depan. Pertama, dari perspektif kebijakan pertahanan, pemerintah Indonesia perlu mempertahankan pendekatan rasional dan jangka panjang dalam pengadaan alutsista. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuisisi Rafale tidak hanya berdampak pada peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengadaan sistem persenjataan strategis idealnya selalu mempertimbangkan dimensi yang lebih luas, termasuk stabilitas hubungan bilateral, peluang kerja sama industri, serta implikasi strategis jangka panjang. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengadaan alutsista tidak bersifat reaktif atau semata-mata teknis, tetapi selaras dengan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Kedua, dalam konteks diplomasi pertahanan, Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama yang berbasis *confidence-building measures*. Kerja sama industri, *offset*, dan transfer teknologi sebagaimana terlihat dalam akuisisi Rafale menunjukkan bahwa kepercayaan antarnegara tidak dibangun hanya melalui kesepakatan politik, tetapi melalui implementasi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa program-program *offset* dan kerja sama industri pertahanan dikelola secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas nasional. Hal ini tidak hanya berdampak pada penguatan industri pertahanan domestik, tetapi juga memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil.

Ketiga, terkait interoperabilitas, peningkatan kemampuan kerja sama operasional dengan mitra internasional perlu dipandang sebagai aset strategis. Interoperabilitas bukan berarti kehilangan otonomi nasional, melainkan peningkatan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika keamanan regional dan

global. Dalam hal ini, Indonesia perlu terus mengembangkan latihan bersama, pertukaran pengetahuan, serta kerja sama teknis yang memungkinkan peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional TNI. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor pertahanan yang adaptif dan kredibel.

Keempat, dari sisi akademik, penelitian mengenai diplomasi pertahanan di Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang luas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis militer atau dinamika geopolitik makro, sementara analisis yang mengintegrasikan pengadaan alutsista dengan diplomasi pertahanan relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas perspektif dengan mengkaji kasus pengadaan alutsista lainnya, membandingkan pola diplomasi pertahanan antarnegara, atau mengevaluasi dampak jangka panjang kerja sama industri pertahanan terhadap otonomi strategis nasional. Secara keseluruhan, saran-saran ini menegaskan pentingnya melihat kebijakan pertahanan secara komprehensif. Akuisisi alutsista tidak lagi dapat dipahami semata sebagai keputusan teknis, tetapi sebagai bagian integral dari strategi diplomasi pertahanan dan kebijakan luar negeri negara.

Selain rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini juga memandang pentingnya penguatan pendekatan strategis jangka panjang dalam pengelolaan kerja sama pertahanan. Akuisisi Rafale menunjukkan bahwa pengadaan alutsista modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai keputusan teknis atau kebutuhan militer, tetapi sebagai bagian dari ekosistem diplomasi pertahanan yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk terus mengembangkan kebijakan pertahanan yang menempatkan pengadaan alutsista sebagai instrumen strategis, bukan sekadar transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan jangka panjang selalu diintegrasikan dengan program pembangunan kapasitas nasional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun industri pertahanan domestik. Dengan demikian, manfaat kerja sama tidak berhenti pada peningkatan kemampuan militer, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemandirian pertahanan nasional.

Di samping itu, penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam strategi diversifikasi mitra pertahanan. Kerja sama dengan Prancis melalui Rafale

telah membuka ruang baru dalam diplomasi pertahanan, namun keberlanjutan stabilitas strategis tetap memerlukan hubungan yang konstruktif dengan berbagai aktor internasional lainnya. Diversifikasi yang dikelola secara cermat akan membantu Indonesia mengurangi risiko ketergantungan sekaligus memperluas opsi kerja sama di masa depan. Penelitian ini juga menyarankan perlunya peningkatan transparansi kebijakan pertahanan dalam ruang publik. Isu pengadaan alutsista sering kali menimbulkan perdebatan karena keterbatasan informasi yang dapat diakses masyarakat. Transparansi yang terukur — tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional — dapat membantu membangun pemahaman publik bahwa kerja sama pertahanan memiliki dimensi strategis yang luas, termasuk diplomasi, stabilitas regional, dan pembangunan industri nasional. Secara keseluruhan, kebijakan pertahanan Indonesia di masa depan diharapkan semakin mampu mengintegrasikan dimensi militer, diplomatik, dan industri secara seimbang. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang tidak hanya meningkatkan kapabilitas pertahanan, tetapi juga aktif membangun stabilitas dan kerja sama keamanan kawasan.